

Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 7: Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Balikpapan, 21 Agustus 2019

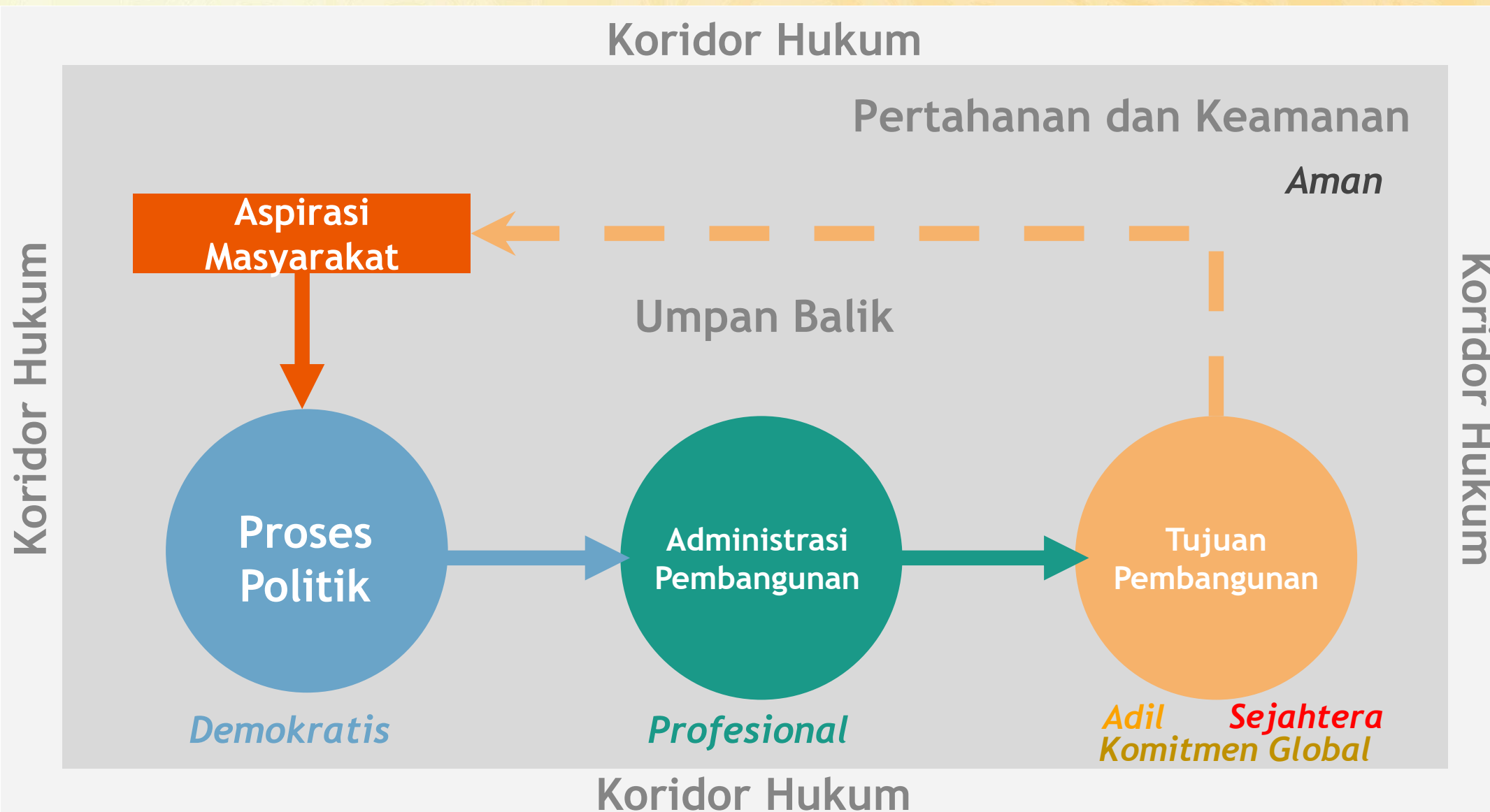
Kondisi Perlu Pembangunan

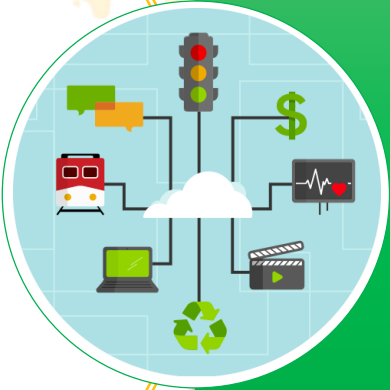
Kondisi yang harus
dihadirkan/tercipta
untuk menghasilkan
Pembangunan
Nasional.*



“Lemahnya Keamanan Nasional akan menjadi beban transaksi terhadap pembangunan, baik dari sisi waktu, risiko, dan biaya.”**

KERANGKA PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM PERTAHANAN DAN KEAMANAN

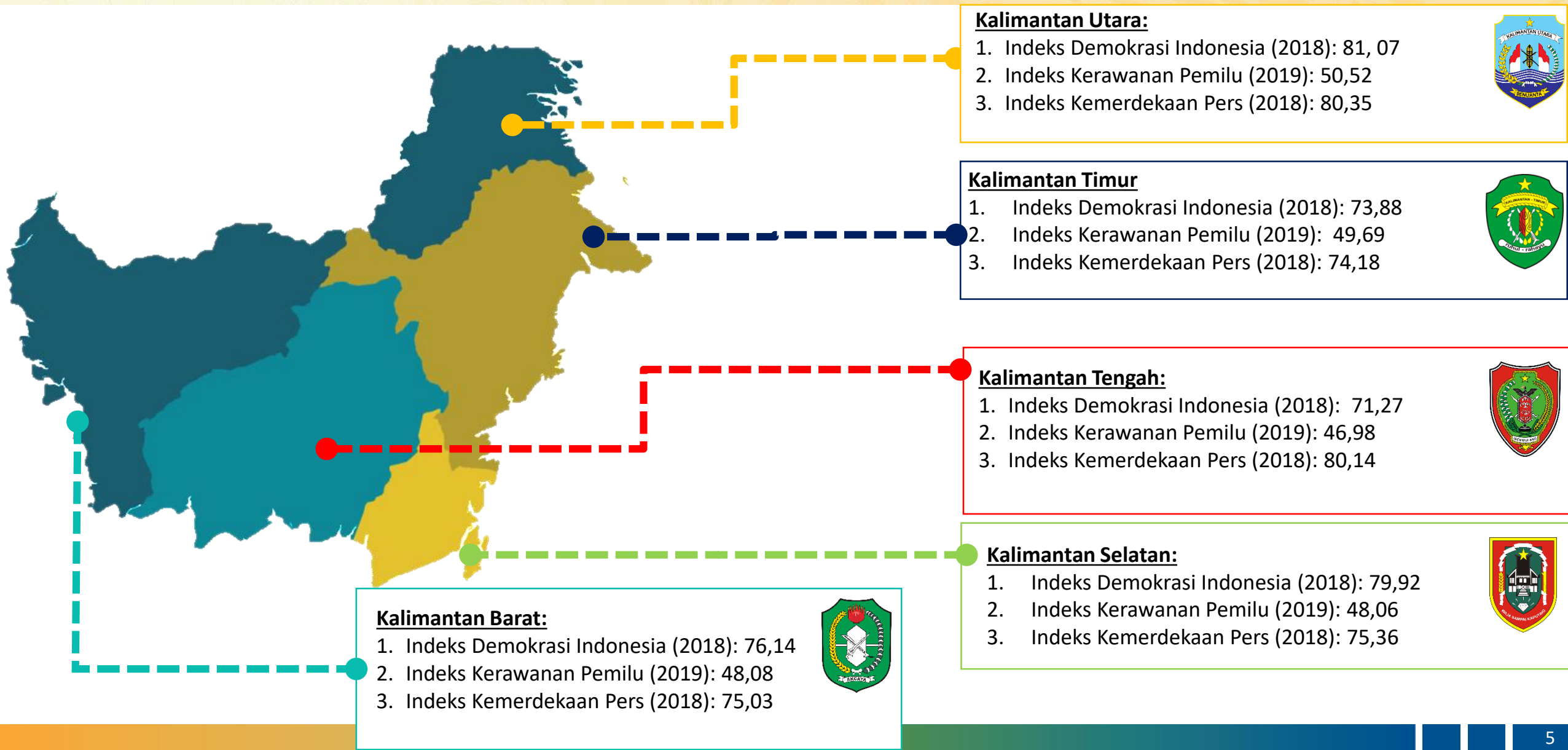




ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, BIDANG POLHUKHANKAM

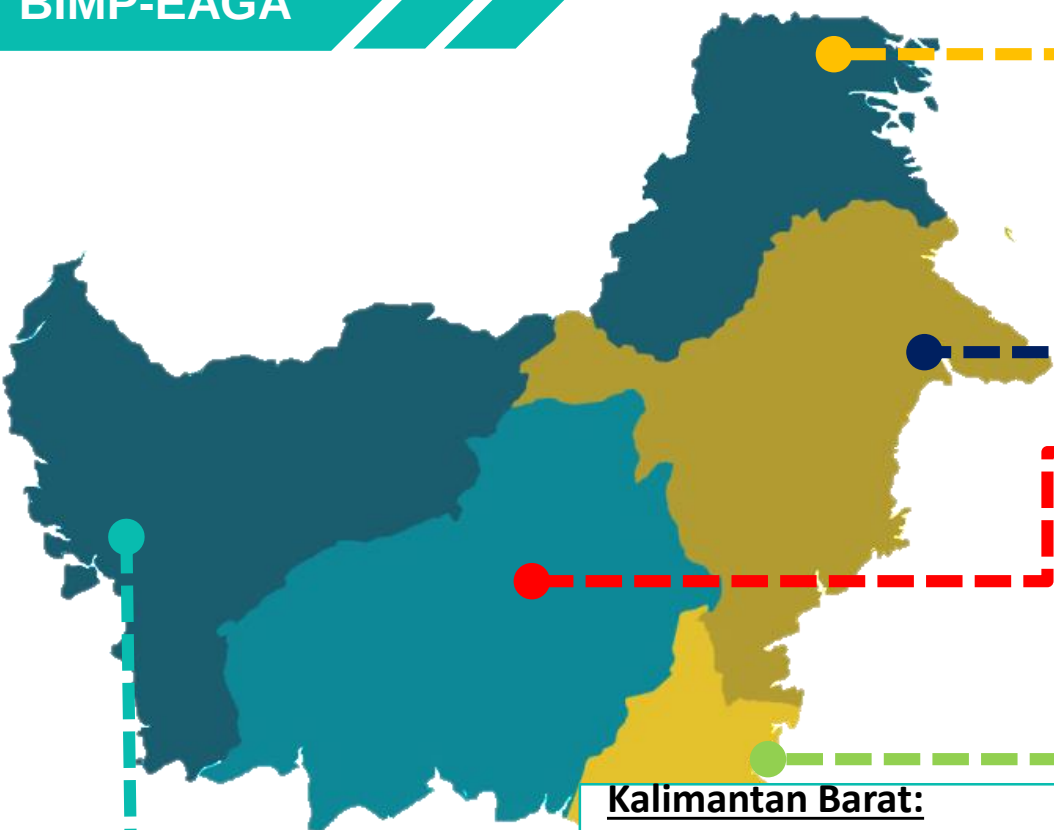
- Pulau Kalimantan -

Isu Strategis POLITIK DALAM NEGERI



Isu Strategis POLITIK LUAR NEGERI

Kerjasama
BIMP-EAGA



Kalimantan Utara:

1. Perjanjian Internasional: 26 treaties
2. Masih berlanjutnya perundingan batas negara



Kalimantan Timur:

1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia: 105 orang
2. Perjanjian Internasional: 57 treaties
3. Masih berlanjutnya perundingan batas negara



Kalimantan Tengah:

1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia: 19 orang
2. Perjanjian Internasional: 52 treaties



Kalimantan Selatan:

1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia: 376 orang
2. Perjanjian Internasional: 77 treaties

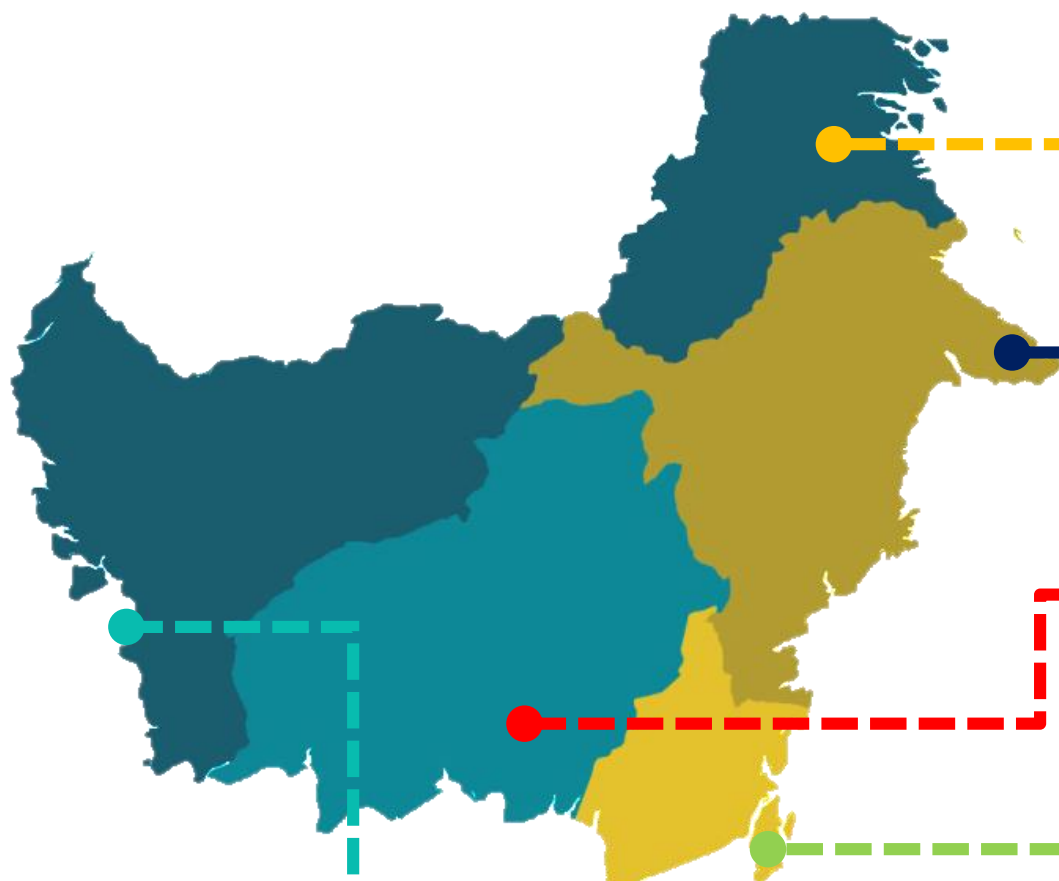


Kalimantan Barat:

1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia: 688 orang
2. Perjanjian Internasional: 51 treaties
3. Masih berlanjutnya perundingan batas negara



Isu Strategis HUKUM



Kalimantan Utara:

1. Tingkat Kepatuhan LHKPN tertinggi se-Kalimantan 97%
2. Terdapat laporan 4 gratifikasi
3. Belum adanya Organisasi Bantuan Hukum di Kalimantan Utara



Kalimantan Timur

1. Overcrowding penghuni Lapas dan Rutan 353%
2. Jumlah Tindak Pidana Korupsi 17 kasus dan 47 Laporan Gratifikasi
3. Terdapat 17 Organisasi Bantuan Hukum
4. Jumlah Anak berhadapan dengan hukum sebesar 142 anak
5. TPPO tertinggi tahun 2017 – 7 kasus



Kalimantan Tengah:

1. Overcrowding penghuni Lapas dan Rutan 181%
2. Jumlah perkara kehutanan tertinggi s/d pertengahan 2019: 22 kasus
3. Terdapat 6 Organisasi Bantuan Hukum
4. Jumlah Anak berhadapan dengan hukum sebesar 35 anak
5. Terdapat laporan 4 gratifikasi



Kalimantan Selatan:

1. Overcrowding penghuni Lapas dan Rutan 266%
2. Jumlah Tindak Pidana Korupsi 10 kasus dan 8 Laporan Gratifikasi
3. Jumlah Anak berhadapan dengan hukum sebesar 88 anak
4. Terdapat laporan 8 gratifikasi
5. Terdapat 2 Organisasi Bantuan Hukum

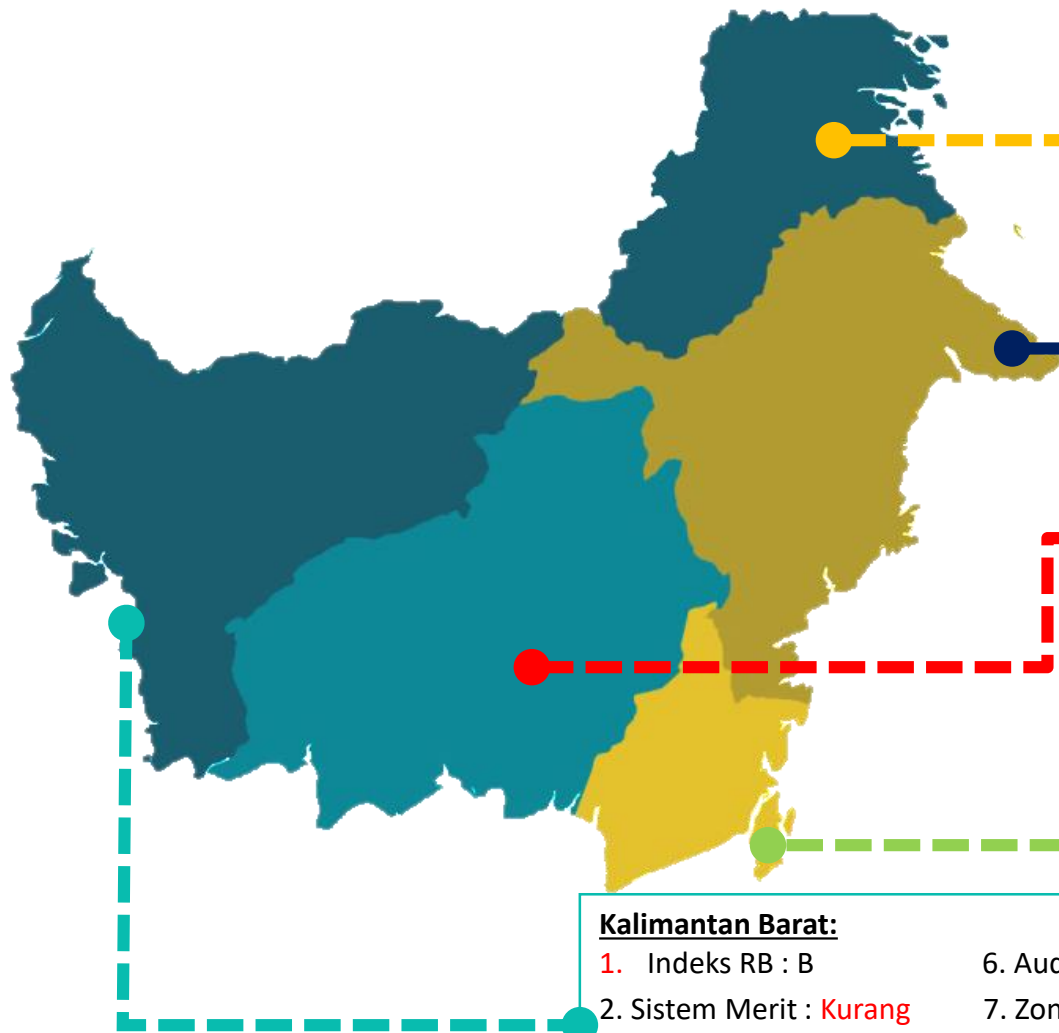


Kalimantan Barat:

1. Overcrowding penghuni Lapas dan Rutan 217%
2. Terdapat 5 Organisasi Bantuan Hukum
3. Jumlah Anak berhadapan dengan hukum sebesar 89 anak
4. Terdapat laporan 18 gratifikasi



Isu Strategis APARATUR NEGARA



Kalimantan Utara

1. Indeks RB
2. Sistem Merit : **Kurang**
3. Maturitas SPIP : - (Belum mencapai Level 3)
4. Skor SAKIP : B
5. Opini BPK : WTP
6. Audit kearsipan : Buruk
7. Zona Kepatuhan : Hijau



Kalimantan Timur

1. Indeks RB : B
2. Sistem Merit : **Kurang**
3. Maturitas SPIP : Level 3
4. Skor SAKIP : BB
5. Opini BPK : WTP
6. Audit kearsipan : Baik
7. Zona kepatuhan : hijau



Kalimantan Tengah:

1. Indeks RB : CC
2. Sistem Merit : **Buruk**
3. Maturitas SPIP : - (Belum lv 3)
4. Skor SAKIP : B
5. Opini BPK : WTP
6. Audit kearsipan : Buruk
7. Zona Kepatuhan : Hijau



Kalimantan Selatan:

1. Indeks RB : B
2. Sistem Merit : Kurang
3. Maturitas SPIP : Level 3
4. Skor SAKIP : A
5. Opini BPK : WTP
6. Audit Kearsipan : Cukup
7. Zona kepatuhan : hijau

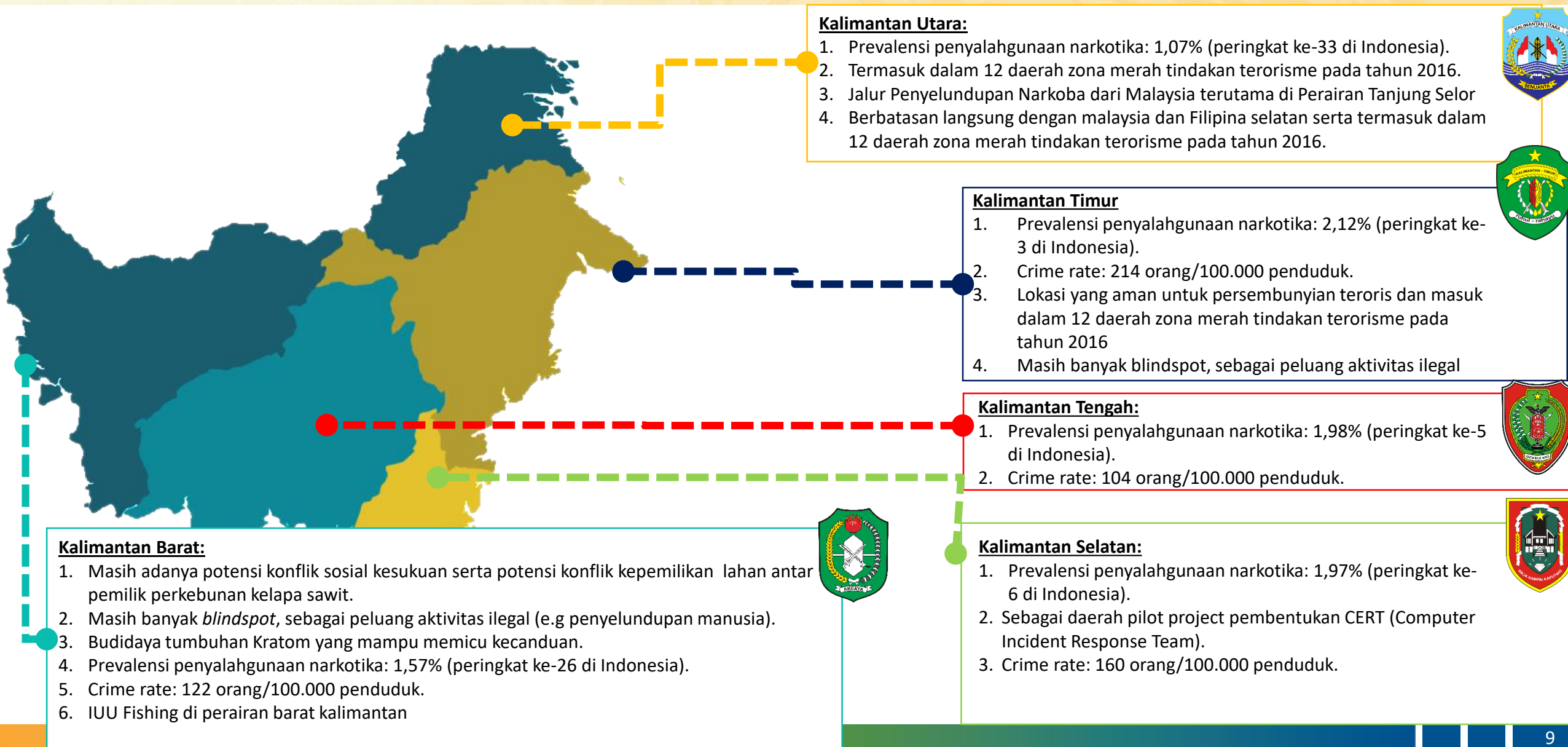


Kalimantan Barat:

1. Indeks RB : B
2. Sistem Merit : **Kurang**
3. Maturitas SPIP : Level 3
4. Skor SAKIP : B
5. Opini BPK : WTP
6. Audit kearsipan : Baik
7. Zona kepatuhan : kuning



Isu Strategis PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Arah Kebijakan dan Strategi





Major Project

Major Project





TERIMA KASIH